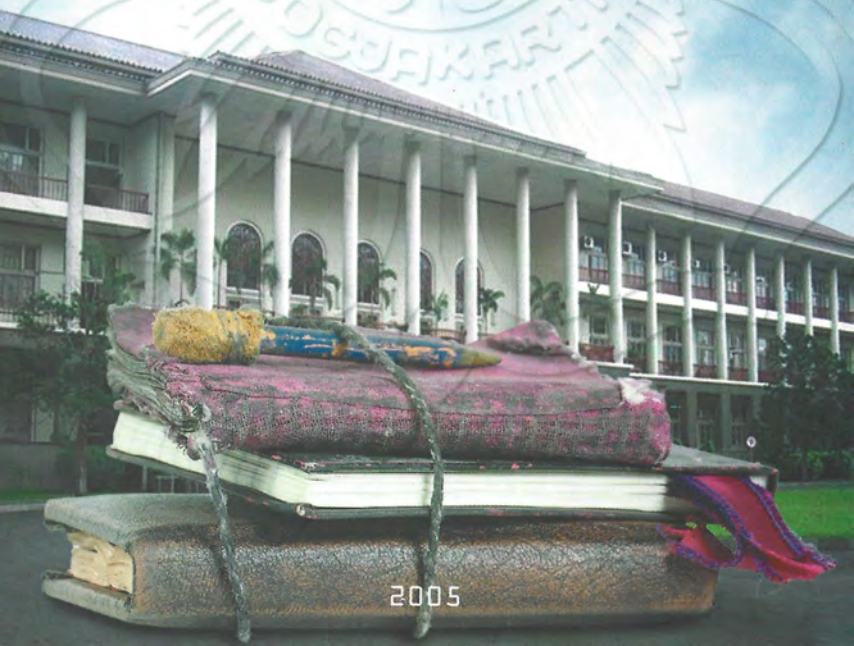


KA FISPOL GAMA

KAMPUS BIRU MENGGUGAH

Seri ke-3 Pemikiran Alumni Fisipol UGM



2005

Seri ke-3 Pemikiran Alumni FISIPOL UGM

Kampus Biru Menggugah



Ketika kami menggugah alumni pada buku seri-1, memang belum banyak alumni yang tergugah.

Ketika kami bangunkan lagi pada buku seri-2, sebagian alumni masih memilih untuk menjadi pembaca saja tapi sekaligus mengkritisi.

Kritik mereka kami jadikan masukan untuk memperbaiki buku seri-3 ini. Dan pada buku seri-3 ini ternyata mereka sudah bangkit, mereka tidak lagi terbuai dalam kehidupan nyata yang mereka nikmati.

Katau buku seri-1 kami terbitkan pada waktu pembentukan Keluarga Alumni Sospol-Fisipol Universitas Gadjah Mada (KAFISPOLGAMA), dan buku kedua kami luncurkan pada Dies Natalis 50 Tahun Fisipol UGM, buku ketiga ini kami terbitkan menyambut Dies Natalis Universitas Gadjah Mada pada penghujung 2005.

Sumbangan pemikiran para alumni ini berupa tulisan lepas kami kelompokkan ke dalam kategori Demokrasi dan HAM; Politik Luar Negeri; Tata Pemerintahan; Kertasayambatan dan Media Massa.



ISBN 979-25-0411-7

KA

GAMA

KA
GAMA
Kampus Biru Menggugah

KAMPUS BIRU MENGGUGAH

Seri ke-3 Pemikiran Alumni Fisipol UGM



2005

KA FISPOL GAMA

Kampus Biru Menggugah

Seri ke-3 Kumpulan Pemikiran Alumni FISIPOL UGM

© 2005 KAFISPOLGAMA

Editor

Ajanto Dwi Nugroho

Danang Girindes

Eddie Siregar

Ign. Eko Adiwahyuni

Jusri Abdi

Nara Patricia

Purhuz Yulianto

Sigit Kurniawan

Desain & Layout

Arcaya Manikotama

Cetakan Pertama: Desember 2005

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT)

KAFISPOLGAMA

Kampus Biru Menggugah Seri ke-3 Kumpulan Pemikiran

Alumni FISIPOL UGM/KAFISPOL GAMA. — Jakarta:

KAFISPOLGAMA, 2005

x + 352 hlm. : 12,5 cm x 19,5 cm

ISBN 979-25-0411-7

KA FISPOL GAMA



Seri ke-3 Pemikiran Alumni FISIPOL UGM

**Kampus Biru
Menggugah**

2005

Quo Vadis Referendum Konstitusi Eropa?

Oleh: Leonard Hutabarat *

Pendahuluan

Uni Eropa adalah entitas regional yang terbesar ketiga di dunia. Populasinya yang berjumlah 455 juta jiwa tersebar di wilayah yang mencapai setengah wilayah daratan Amerika Serikat. Dalam dua tahun ini, rakyat Eropa juga sedang mengalami proses ratifikasi suatu konstitusi, yang akan menyatukan tujuan pribadi dan kolektif mereka menuju sebuah integrasi politik di kawasan Eropa.

Tulisan ini akan membahas latar belakang munculnya organisasi regional di kawasan Eropa, Konstitusi Uni Eropa, dan faktor-faktor penyebab kegagalan referendum Konstitusi Uni Eropa di Perancis.

Eropa dan "European dream"

Apakah yang dimaksud dengan Uni Eropa? Perkembangan yang terjadi dalam politik internasional sehubungan dengan apa yang terjadi dalam institusi Uni Eropa saat ini telah menarik perhatian banyak pengamat hubungan internasional. Arsitektur Uni Eropa sangatlah unik, apakah Uni Eropa termasuk dalam definisi negara ataukah masuk dalam kategori organisasi internasional. Meskipun definisi tersebut menjadi

perdebatan, namun fenomena yang ada adalah belum ada sebelumnya suatu institusi seperti Uni Eropa terjadi dalam politik internasional.

Uni Eropa bukanlah sebuah negara, walaupun tindakannya seperti sebuah institusi negara. Hukum Uni Eropa berada di atas hukum nasional negara anggotanya dan bersifat mengikat (*binding*). Uni Eropa juga memiliki mata uang tunggal, yaitu Euro, yang digunakan oleh banyak negara anggotanya. Organisasi ini juga mengatur dan mengkoordinasikan perdagangan, energi, transportasi, komunikasi, dan bahkan sektor pendidikan melewati batas nasional negara anggotanya. Rakyatnya juga menikmati paspor Uni Eropa. Eropa juga memiliki sebuah parlemen dan pengadilan Uni Eropa, yang keputusannya mengikat warganya. Dalam banyak hal, Uni Eropa memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai sebuah negara.

Namun demikian, Uni Eropa tidak merupakan suatu entitas wilayah yang terikat. Meskipun Uni Eropa melakukan koordinasi dan mengatur aktivitas di wilayah teritorial negara-negara anggotanya, Uni Eropa tidaklah mempunyai klaim terhadap wilayah. Hal inilah yang menjadikan Uni Eropa merupakan suatu entitas yang unik.



Nation-states adalah suatu konsep yang didefinisikan secara geografis dan memiliki organ yang mengontrol wilayah tertentu.

Nation-states adalah suatu konsep yang didefinisikan secara geografis dan memiliki organ yang mengontrol wilayah tertentu. Bahkan, kerajaan dan dinasti memiliki klaim terhadap kawasan yang menjadi yurisdiksi kerajaannya. Negara anggota Uni Eropa masih mengontrol wilayahnya, namun kekuasaan absolutnya terhadap wilayah geografisnya sedikit demi sedikit semakin berkurang dengan adanya legislasi Uni Eropa. Misalnya, *Schengen Agreement*, sebuah perjanjian oleh negara anggota Uni Eropa yang ditandatangani tahun 1985, memberikan kekuasaan bagi Uni Eropa untuk mengatur masalah migrasi bagi negara anggota Uni Eropa. Termasuk pembentukan polisi Eropa yang mengawasi perbatasan Uni Eropa.

Meskipun Uni Eropa tidak dibatasi dengan teritorial tertentu, organisasi ini berlanjut dengan menerima masuknya anggota-anggota baru di bawah payung organisasi Uni Eropa. Sebenarnya kriteria keanggotaan Uni Eropa masih didasarkan pada nilai (*values*) daripada kondisi-kondisi geografis. Secara teoritis, setiap negara dapat mengajukan aplikasi keanggotaan apabila memenuhi kualifikasi menjadi anggota Uni Eropa. Dasar pertimbangan yang bersifat *open-ended* dan *inclusive* ini telah menjadikan perdebatan di antara anggotanya mengenai calon-calon negara kandidat. Beberapa negara berargumentasi bahwa meskipun keanggotaan didasarkan pada nilai-nilai yang ada, namun tetap harus hanya terbatas pada negara-negara yang mencakup *historical Europe*. Masalahnya adalah, para sejarawan tidak setuju pada apa yang disebut dengan *historical Europe*. Para ahli geografi menyatakan tidak ada yang disebut sebagai *European continent*. Pihak yang lain menyebutkan bahwa Eropa dimulai dari ujung Samudera

Atlantik dan melintas ke Eropa hingga ke Rusia dan bahkan ke Turki di bagian tenggara. Apakah Rusia bagian dari Eropa atau Asia? Apakah Turki bagian Eropa atau Timur Tengah? Mengingat *Ottoman Empire* menguasai bagian Eropa dalam beberapa waktu, jadi apakah Eropa juga bagian dari Timur Tengah? Banyak juga pihak yang menyatakan Eropa terikat pada budaya yang berakar dari *Greco-Roman* dari hasil pencerahan pada abad ke-18.

Perdebatan akan definisi ini masih panjang. Termasuk apakah Turki dan Rusia dapat menjadi anggota Uni Eropa atau tidak. Selain itu juga terdapat kemungkinan ide perluasan untuk memasukkan Afrika Utara dan Timur Tengah. Dengan demikian, dimana akan menjadi batas akhir dari Uni Eropa? Tidak ada yang tahu. Para pengamat Uni Eropa menggunakan istilah *variable geometry* untuk mencakup semua kombinasi yang memungkinkan dari perluasan Uni Eropa. Kesulitan untuk mendefinisikan secara pasti adalah karena proses metamorfosis yang berlanjut terus menuju bentuk baru dan penyesuaian terhadap realitas yang baru dari organisasi ini.

Tidak seperti kekaisaran Eropa pada masa lalu yang diwarnai dengan kemenangan honorik di medan pertempuran, Uni Eropa adalah institusi yang terlahir dari debu-debu kekalahan Eropa. Terdapat suatu keinginan untuk tidak mengulangi kembali apa yang terjadi pada sejarah masa lalu Eropa. Eropa berkembang dari bayang-bayang ribuan tahun dalam konflik, perang, dan pertumpahan darah, puncaknya dua perang dunia kurang dari lima puluh tahun. Dua perang yang mengakibatkan populasinya terbunuh, monumen dan infrastrukturnya rusak, dan kehidupan mereka hancur. Mengingat ini, lalu ada keinginan dari mereka untuk tidak berperang

lagi satu sama lain, negara-negara Eropa mencari mekanisme politik yang akan menyatukan mereka dan mencegah mereka kembali pada rivalitas yang lama.

Pada tahun 1948 dalam *Congress of Europe*, Winston Churchill mengingatkan akan masa depan benua Eropa yang hancur akibat perang dan menyampaikan visinya akan *European Dream*. Churchill menyatakan:

*"We hope to see a Europe where men of every country will think of being a European as of belonging to their native land, and ... wherever they go in this wide domain ... will truly feel, 'Here I am at home'"*¹

Jean Monnet yang menciptakan ide sebuah *common European community*, memahami benar betapa sukarnya untuk memenuhi mimpi Churchill tersebut. Masalahnya, menurut Monnet, adalah *"Europe has never existed; one has genuinely to create Europe"*.² Hal ini berarti menjadikan masyarakat di Eropa menyadari akan keeroptan mereka.

Pembukaan dari *Treaty of Rome* tahun 1957, yang membentuk *European Community*, menyebutkan dengan jelas tujuan organisasi tersebut yaitu: *"to lay the foundations for an ever closer union among the peoples of Europe"*.³ Harapan besarnya adalah *"to substitute for age-old rivalries the merging of their essential interests; to create, by establishing an economic community, the basis of broader and deeper community among peoples long divided by bloody conflicts; and to lay the foundation for institutions which will give direction to a destiny henceforward shared"*.⁴ Ini merupakan entitas politik pertama dalam sejarah yang alasan dibentuknya adalah untuk mewujudkan perdamaian (*to build peace*).⁵

Saat ini dua pertiga masyarakat yang tinggal di negara anggota Uni Eropa menyatakan bahwa mereka merasakan *European*. Enam dari sepuluh warga Uni Eropa merasa bagian dari Eropa, sementara sepertiga pemuda antara umur 21 hingga 35 tahun menyatakan mereka memandang dirinya lebih Eropa daripada sebagai warga nasional negara asalnya.⁶ Dalam salah satu survey *World Economic Forum* terhadap para pemimpin Eropa ditemukan bahwa 92 persen dari mereka melihat identifikasi masa yang akan datang lebih kepada Eropa daripada identitas nasionalnya.⁷ Perubahan ini merupakan hal yang luar biasa bagaimana persepsi masyarakat dapat berubah dalam setengah abad.

Konstitusi Uni Eropa

Dalam Konstitusi Uni Eropa, yang mencanumkan *Charter of Fundamental Rights*, Uni Eropa akan memiliki kekuasaan untuk menandatangani perjanjian internasional atas namanya sendiri, dan bersifat mengikat bagi negara-negara anggotanya. Hal ini juga pada akhirnya dimungkinkan untuk memperoleh satu kursi dalam Dewan Keamanan PBB – menggantikan Inggris dan Perancis. Uni Eropa juga akan memiliki seorang presiden yang dipilih oleh *European Council* (Dewan Eropa) yang memiliki masa jabatan lima tahun dan bertanggung jawab terhadap penentuan agenda Uni Eropa. Saat ini presidensi Uni Eropa berputar setiap enam bulan sekali.

Uni Eropa juga akan mempunyai seorang menteri luar negeri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pertahanan dan luar negeri. Konstitusi Eropa memantulkannya kebijakan pertahanan dan luar negeri

yang tunggal dan negara-negara anggota diminta untuk *"unreservedly support the Union's foreign and security policy in a spirit of loyalty and mutual solidarity"*.⁸ Meskipun demikian, negara anggota masih diberikan suatu *escape clause*. Negara anggota masih dapat abstain dari voting atau menyatakan *tidak* yang memungkinkannya untuk memblokir suatu proposal kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Dewan Eropa.⁹

Selain itu, Uni Eropa juga menyiapkan sebuah pasukan pemukul reaksi cepat Eropa (*European rapid-reaction strike force*). Namun, pemerintah nasional masih mengontrol angkatan bersenjata sendiri. Valery Giscard d'Estaing, mantan Presiden Perancis yang memimpin proses penyusunan konstitusi Uni Eropa menyatakan keyakinannya bahwa masih membutuhkan waktu 20 tahun lagi bagi Uni Eropa untuk memiliki sebuah kebijakan luar negeri yang satu dan terintegrasi serta berbicara dengan satu suara dalam arena internasional.¹⁰

Negara anggota juga masih memiliki wewenang dalam pemberian kewarganegaraan, walaupun warga dari negara anggota memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di negara anggota Uni Eropa lainnya. Dalam konstitusi, kebijakan keimigrasian diatur untuk mengharmonisasikan masalah-masalah keimigrasian dengan isu-isu pengungsi dan suaka dan hal ini akan diputuskan dengan suara mayoritas. Dalam ketentuan yang lama setiap negara anggota masih dapat melakukan veto untuk hal ini.¹¹

Konstitusi Uni Eropa merupakan sejenis kompromi bagi setiap pihak. Bagi negara seperti Inggris dan Perancis yang meyakini bahwa Uni Eropa seharusnya merupakan perpanjangan dan bukan pengganti bagi *nations-state*, konstitusi

memberikan suatu alternatif. Konstitusi memberikan penguatan bagi hak suara negara-negara besar dalam *Council of Ministers*.¹² Dalam konstitusi, Council dapat menetapkan legislasi apabila setengah dari anggota, yang mewakili 60 persen populasi Uni Eropa menyetujuinya (*qualified majority voting*). Hal ini memberikan negara-negara besar, seperti Jerman, Inggris, Perancis, dan Italia kekuatan yang potensial untuk mengarahkan agenda legislasi. Sementara itu, kekuasaan *Council of Ministers* dikurangi dengan dialihkan kepada Komisi Eropa.

Bagi negara-negara yang lebih kecil, yang menginginkan sebuah uni federal, konstitusi diharapkan memperkuat *European Commission* (Komisi Eropa). Komisi memiliki monopoli terhadap hak untuk mengajukan legislasi yang baru. Presiden Komisi yang dipilih oleh Parlemen Eropa akan mempunyai kekuasaan eksekutif yang lebih besar.

Parlemen Eropa juga akan memiliki kekuasaan pembuatan keputusan dan anggaran. Kebanyakan legislasi Uni Eropa yang ditetapkan dalam *Council of Ministers* akan membutuhkan persetujuan dari Parlemen Eropa.

Kegagalan Referendum Konstitusi Eropa

Hasil referendum konstitusi Uni Eropa di Perancis tanggal 29 Mei lalu, menunjukkan suara penolakan jauh melebihi yang pro. Penolakan 54,8% rakyat Perancis terhadap Konstitusi Eropa yang dirandatangani 29 Oktober 2004 di Roma, merupakan pukulan berat bagi masa depan Uni Eropa. Presiden Chirac menyatakan bahwa penolakan warganya akan menimbulkan kesulitan bagi Perancis di dalam Uni Eropa, sebagai negara yang merupakan salah satu *the founding fathers*

Uni Eropa. Dukungan yang hanya mencapai 45,1% tersebut telah mengirimkan sinyal negatif ke seluruh Eropa. Termasuk dapat berdampak terhadap negara-negara yang sudah bersiap untuk melaksanakan referendum sejenis. Hasil referendum di Perancis juga tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat tingginya tingkat partisipasi yang menunjukkan angka sekitar 70%. Hasil ini telah menimbulkan pertanyaan besar akan masa depan Uni Eropa. Hasil referendum di Perancis sangat penting tidak hanya bagi negara tersebut, namun juga seluruh Uni Eropa. Jika konstitusi itu ditolak di Perancis, maka akan menimbulkan efek domino di sejumlah negara Uni Eropa lainnya.

Penolakan di Perancis membuka suatu periode ketidakpastian politik dalam Uni Eropa dimana konstitusi tersebut masih perlu diratifikasi oleh 25 negara anggotanya. Akankah konstitusi UE berakdir sampai di sini? Sebab konstitusi tersebut baru bisa diberlakukan apabila diratifikasi semua anggota Uni Eropa. Mengapa "gempa bumi politik" ini terjadi di Perancis? Akankah Perancis, sebagai salah satu negara pencetus integrasi Eropa akan menghebatkan langkahnya? Perancis dan Jerman menjadi pelopor Uni Eropa dengan Deklarasi Robert Schuman tahun 1950 yang melahirkan *European Coal and Steel Cooperation* (ECSC). Sejak saat itu, Perancis menjadi negara sentral dari tiap proyek Uni Eropa yang ada, dari pasar bersama hingga Euro. Termasuk upaya penyusunan draft konstitusi yang dipimpin oleh mantan Presiden Perancis Valéry Giscard d'Estaing. Semua partai politik utama di Perancis seperti Partai UMP, UDF, dan Partai Sosialis mendukung konstitusi Eropa. Jadi, mengapa rakyat Perancis tetap menolak Konstitusi Eropa?

Jawaban terhadap referendum itu merupakan introspeksi bagi Perancis. Terdapat setidaknya tiga elemen di dalam penolakan rakyat Perancis terhadap integrasi politik yang lebih luas tersebut. *Pertama*, adalah mengenai posisi Perancis di panggung internasional. *Kedua*, berkaitan dengan kegagalan ekonomi Perancis untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Dan *ketiga*, adalah sehubungan dengan karakteristik elit politik Perancis.¹²

Perdebatan Ideologi

Perbedaan pandangan dalam idealisasi model sosial yang pas untuk Uni Eropa di masa depan telah membawanya pada panggung perdebatan klasik yang menyangkut ideologi. Kegandrungan akan debat idealisme ini seolah memutar-balik jarum jam sejarah, mengungkit lagi perdebatan klasik soal konsep sosial ekonomi yang dilatarbelakangi ideologi.

Presiden Perancis, Chirac, pernah menyatakan liberalisme sama bahayanya dengan komunisme dan kedua ideologi itu akhirnya akan membentur tembok. Sikap ini menunjukkan Perancis akan tetap menjalankan politik ekonomi sosialis yang menekankan peran negara yang intervensionis. Dengan idealisme ini, Perancis lebih menginginkan sebuah Uni Eropa yang lebih kohesif dengan jumlah anggota lebih terbatas.

Sementara itu, PM Inggris Tony Blair cenderung meng-osung paham ekonomi Anglo-Saxon yang liberal. Dengan paham ini, Uni Eropa yang dibayangkan oleh Blair adalah kerja sama regional yang lebih luas, dengan anggota lebih besar, tapi dengan ikatan politik yang longgar. Idealisasi Blair terhadap format politik Uni Eropa ini sejalan dengan paham ekonomi neoliberal yang membutuhkan pasar seluas mungkin.

Dulu yang didambakan oleh Eropa adalah perdamaian dan keamanan negara dari ancaman perang. Sekarang yang dibutuhkan bukan lagi hanya keamanan negara, tapi juga keamanan perorangan.

Linia puluh tahun lalu, setelah terporak dalam kenistaan Perang Dunia II, pemimpin Eropa mendambakan perdamaian dan stabilitas. Kini, proyek perdamaian dan stabilisasi itu selesai dengan terbentuknya Uni Eropa. Dari konteks ancaman perang tradisional, Uni Eropa adalah kawasan aman damai. Tapi, dunia berubah, begitu pun tuntutanannya, yang sialnya, tidak selalu terkait dengan ideologi. Dulu yang didambakan oleh Eropa adalah perdamaian dan keamanan negara dari ancaman perang. Sekarang yang dibutuhkan bukan lagi hanya keamanan negara, tapi juga keamanan perorangan.

Keamanan perorangan merupakan kebutuhan langsung bagi publik Uni Eropa. Selama ini, setelah peristiwa 11 September 2001, isu terorisme hanya menjadi konsen Amerika Serikat. Tapi, kini terorisme sudah ada di halaman belakang Uni Eropa setelah pemboman jaringan transportasi di Madrid dan London. Dan mestinya para pemimpin Uni Eropa tahu para teroris itu tidak bertanya lebih dulu apakah Spanyol atau Inggris itu berpaham Anglo-Saxon atau sosialis sebelum mereka meledakkan bom. Dalam konteks ini, maka yang diruntut publik Eropa sesungguhnya adalah agar mereka aman. Mereka ingin para pemimpinnya memerangi teroris.

bukan berdebat soal neo-liberalisme atau sosialisme.¹⁴

Dalam banyak kampanye politiknya Presiden Chirac seringkali mendengungkan perlunya suatu Eropa yang kuat *vis-à-vis* kekuatan *super power* AS, termasuk kebangkitan China. Apa yang disebut *Europe puissance* dengan kapabilitas pertahanannya merupakan inspirasi Perancis yang tidak bercirikan Anglo-Saxon, *atlanticist*. Para penentang ratifikasi menyatakan konstitusi baru Uni Eropa hanya akan makin memperkuat kekuasaan negara Anglo-Saxon secara ekonomi. Perluasan keanggotaan Uni Eropa menjadi 25 negara menimbulkan kesan berkurangnya pengaruh dan suara Perancis di Uni Eropa dan dunia internasional. Juga adanya ancaman terhadap bahasa Perancis, tantangan terhadap visi yang ada, serta resiko kehilangan pekerjaan. Hal-hal tersebut telah menjadikan ancaman bagi identitas Perancis. Masalahnya adalah rakyat Perancis tidak melihat Uni Eropa sebagai suatu entitas yang dapat membawa kemajuan dan keamanan di dalam dunia yang penuh konflik ini. Selain itu, publik Perancis tidak melihat Eropa baru yang disimbolkan dengan suatu konstitusi, sebagai penjamin dari pernyataan Chirac akan *Europe puissance*.

Jatuhnya Kepercayaan Publik

Jika debat ideologi sudah tidak relevan lagi, bagaimana menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap masa depan Uni Eropa? Mungkin langkah pragmatis dan prioritas yang membumi perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan bagi Konstitusi Eropa. Selain memerangi terorisme, penanganan imigrasi dan pengangguran akan menjawab kebutuhan mendesak warga Uni Eropa. Meluasnya keang-

gotaan UE hingga mencakup negara-negara di Eropa Timur yang memiliki latar belakang etnik dan agama berbeda dapat saja memicu ketegangan baru.

Masalah pengangguran menjadi salah satu pemacu rakyat Perancis menolak Konstitusi Eropa. Masyarakat Uni Eropa resah terhadap arus migrasi dari negara anggota baru (bekas negara komunis Eropa Timur) dan dari negara-negara lalu (kawasan Afrika Utara) yang umumnya lebih ulet dan tidak memilih-milih jenis pekerjaan. Keresahan inilah kiranya yang perlu dijawab oleh para pemimpin Uni Eropa agar para konstituenya menjadi faham bahwa Konstitusi Eropa, yang di Bagian III-nya banyak mengatur kebijakan liberalisasi ekonomi, memang betul-betul memberi manfaat kepada mereka.

Benar saja bahwa hasil debat ideologi akan menjadi panduan strategis bagi pembentukan Uni Eropa dengan identitas yang jelas di masa depan. Tapi, yang lebih dibutuhkan oleh publik Eropa saat ini adalah langkah-langkah pragmatis yang menjawab kebutuhan jangka pendek mereka: aman dari ancaman teror dan mendapat pekerjaan. Apabila para pemimpin Uni Eropa mampu menjawab ini, kepercayaan publik dapat pulih, sehingga mereka akan memberikan dukungan ketika referendum Konstitusi Uni Eropa dibuka kembali tahun depan.

Kekhawatiran akan ekonomi Perancis dan adanya delokalisasi serta hilangnya lapangan kerja (dengan masuknya negara-negara eks Eropa Timur sangat mempengaruhi pilihan publik Perancis dalam referendum lalu. Demikian pula halnya dengan liberalisasi jasa dan kekhawatiran para pekerja murah akan membanjiri Perancis serta memotong penghasilan warga

Perancis. Hal inilah yang menyebabkan banyak generasi muda merasa sangat pesimis dan khawatir. Isu pengangguran di Perancis yang telah mencapai 10,2% tahun 2004 juga telah menjadi kekhawatiran utama dalam 20 tahun terakhir ini dan telah dapat memobilisasi dukungan bagi pihak yang kontra terhadap konstitusi.

Hasil referendum menunjukkan protes publik terhadap para elit politik yang dipandang tidak jujur terhadap konstituennya. Hasil referendum juga merupakan protes dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Chirac saat ini. Rakyat Perancis merasa di *fait accompli* dengan janji-janji yang dianggap tidak jujur. Para politisi dan ekonom menyatakan Euro akan menurunkan harga di Perancis, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Uni Eropa dipandang lebih mementingkan kepentingan bisnis daripada permasalahan sosial yang ada selama ini.

Kesan selintas, krisis Uni Eropa ini hanya lantaran kesenjangan komunikasi politik antara elit dan rakyatnya. Kesan lain, seolah-olah krisis itu disebabkan oleh masalah teknis ekonomis semata, seperti subsidi pertanian Perancis dan potongan kontribusi Inggris. Namun, sebenarnya jauh lebih serius dari itu. Krisis Uni Eropa akhir-akhir ini sejatinya sudah menajak jauh sampai ke masalah konsep dan idealisme mengenai tatanan sosial ekonomi masa depan Uni Eropa. Perdebatan baik antarpemimpin negara anggota maupun elit Uni Eropa di Brussel telah merambah ke isu ideologi.¹⁵

Skenario Paska Penolakan Konstitusi Eropa

Apakah terdapat "Plan B" untuk menyelamatkan Konstitusi Uni Eropa? Setelah dua tahun paska penandatanganan traktat

bagi Konstitusi Eropa dan empat per lima negara anggota telah meratifikasinya. Di sisi lain, satu atau lebih negara anggota mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ratifikasi, masalah tersebut akan diajukan kepada *European Council*. Demikian pernyataan yang dihasilkan oleh para pemimpin Uni Eropa dalam *Intergovernmental Conference*. Dengan demikian, maka penolakan oleh satu negara anggota Uni Eropa secara otomatis mengakhiri Konstitusi. Setidaknya proses ratifikasi harus dilakukan di ke-25 anggota Uni Eropa sebelum diputuskan langkah apa yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Dampak penolakan terhadap Konstitusi Eropa di Perancis memunculkan dua skenario. *Pertama*, tetap melanjutkan proses ratifikasi dan meminta negara yang menolak untuk melakukan voting kembali dengan mempertimbangkan alasan-alasan penolakan yang ada. Hal ini pernah dilakukan oleh Denmark terhadap *Maastricht Treaty*. *Kedua*, menghentikan proses ratifikasi dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Para pemimpin Uni Eropa akan berupaya menarik bebepata bagian dari konstitusi dengan revisi sesuai kesepakatan di antara para kepala negara/kepala pemerintahan, meskipun langkah ini berarti negara anggota tidak memperoleh legitimasi sepenuhnya dari masyarakat. Upaya untuk mendapatkan versi yang baru dari konstitusi dengan mengandung perubahan utama dalam hal proses pengambilan keputusan Uni Eropa dan pasal-pasal penting lainnya mungkin diharapkan akan menghasilkan teks konstitusi yang tidak terlalu kontroversial untuk diratifikasi.

Uraian Perancis kemungkinan besar sukar untuk diterima negara lain, seperti halnya Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menyatakan tanggal 18 Mei lalu bahwa tidak

ada "Plan B" apabila Perancis menolak konstitusi dan tidak ada kemungkinan untuk menegosiasikan kembali konstitusi tersebut. Ataukah kegagalan dalam meratifikasi konstitusi ini akan mengarah kepada stimulasi bagi perwujudan negara-negara "core group", termasuk Perancis, yang akan melanjutkan integrasi lebih cepat daripada yang lain.

Penutup

Krisis yang dihadapi Uni Eropa berkaitan dengan hasil referendum di Perancis dan penolakan konstitusi Eropa dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah entitas regional itu. Belum lagi menyadari betul apa yang terjadi di balik gagalnya referendum di Perancis dan Belanda, masyarakatnya juga dibuat heran oleh kegagalan KTT di Brussel, Belgia, 16-17 Juni, untuk menyetujui anggaran belanja Uni Eropa. Dua kegagalan itu telah menimbulkan keraguan terhadap masa depan dan relevansi entitas regional itu. Kepercayaan publik terhadap Uni Eropa goyah. Bahkan, Perdana Menteri Luksemburg Jean-Claude Juncker yang ketika itu menjabat Presiden Dewan Eropa, berkomentar pahit bahwa Uni Eropa sedang dalam krisis luar biasa.

Namun demikian, Uni Eropa dapat berjalan terus tanpa konstitusi dengan aturan-aturan yang telah ada selama ini. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa "tsunami politik" di Perancis dapat menyebabkan krisis dan stagnasi di tubuh Uni Eropa, termasuk penundaan terhadap rencana perluasan keanggotaan Uni Eropa selanjutnya. Akankah terjadi *moribund effect* akibat hasil referendum Perancis? Masih terlalu dini untuk dipastikan mengingat dinamika yang masih berkembang apabila berbicara mengenai Eropa bersatu. Apa-

bila Presiden Chirac menyatakan "*One cannot be European and vote no. The EU Treaty is the daughter of 1789.*", maka hasil referendum di Perancis merupakan *quo vadis* bagi masa depan Eropa selanjutnya.

Endnotes

- ¹ Leonard Harabur, Ph.D., adalah seorang Diplomat Jenderal Amerika dan Eropa pada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Menyelesaikan studi S-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S-2 Ilmu Politik dengan konsentrasi Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Indonesia. Menyelesaikan studi doktoral pada Centre d'Etude Diplomatiques et Strategiques, Ecole des Hautes Etudes Internationales Paris, Perancis dan post-graduate diploma dengan spesialisasi Uni Eropa pada Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris, Perancis.
- ² Byatt, A. S., "What Is a European", *The New York Times Magazine*, 31 October 2002.
- ³ Elaine Scallan, "Visions of a Union (Europe Groups for an Identity)", *The New York Times*, 15 Desember 2002.
- ⁴ *Treaty of Rome*, www.unipa.eu.int, 25 Maret, 1957.
- ⁵ Commission of the European Communities (CEC), "Treaties Establishing the European Communities", *Official Publications of the European Communities (OOPEC)*, Luxembourg, 1983.
- ⁶ Stone, Chris, "Building Europe: The Cultural Politics of European Integration", Routledge, London, 2000, hlm 25.
- ⁷ The European Commission, "How European See Themselves", 2000, September.
- ⁸ Tony Kinnaman, "The Power of Europe", *Nationweek*, 2002, 16-23 September.
- ⁹ Heathcoat, David -Amory, "The Constitution Is a Sham", *The Wall Street Journal Europe*, 2003, 20-22 Juni.

- ¹ "Special Report - Europe's Constitution", *The Economist*, 2003, 21 Juni, p. 22.
- ² Mitchem, Brandon, "EU Backs Initiative on Draft Constitution", *The Wall Street Journal Europe*, 23 June 2003.
- ³ "Special Report - Europe's Constitution", *The Economist*, 21 June 2003, p. 22.
- ⁴ Paker, George and Daniel Dombey, "Not Perfect But More Than We Could Have Hoped For : Europe's Draft Constitution", *Financial Times*, 20 June 2003.
- ⁵ Hutabarat, Leonard, "Quo Vadis Uni Eropa", *Kompas*, 11 Juni 2003.
- ⁶ Djumala, Darmasjah, "Uni Eropa, Debat Klauk, Kepercayaan Publik", *Sinar Harapan*, 16 Juli 2003.
- ⁷ *Ibid.*

Daftar Pustaka

- Byatt, A. S., "What Is a European", *The New York Times Magazine*, 2002, 31 Oktober.
- Djumala, Darmasjah, "Uni Eropa, Debat Klauk, Kepercayaan Publik", *Sinar Harapan*, 2005, 16 Juli.
- Emanuelson, Tony, "The Power of Europe", *Newsweek*, 2002, 16-23 September.
- The Economist*, "Special Report - Europe's Constitution", 2003, 21 Juni.
- Hutabarat, Leonard, "Quo Vadis Uni Eropa", *Kompas*, 2005, 11 Juni.
- Healthcoat-Arnery, David, "The Constitution Is a Shovel", *The Wall Street Journal Europe*, 2003, 20-22 Juni.
- Mitchem, Brandon, "EU Backs Initiative on Draft Constitution", *The Wall Street Journal Europe*, 2003, 23 Juni.
- Paker, George and Daniel Dombey, "Not Perfect But More Than We Could Have Hoped For - Europe's Draft Constitution", *Financial Times*, 2003, 20 Juni.
- Shore, Chris, "Building Europe: The Cultural Politics of European Integration", Routledge - London, 2000.
- Scinlms, Elise, "Visions of a Union: Europe Gropes for an Identity", *The New York Times*, 2002, 15 Desember.

Dokumen

- European Commission, "How European See Themselves", September 2000.
- Commission of the European Communities (CEC), "Treaties Establishing the European Communities" Luxembourg: Official Publications of the European Communities (OJPEU), 1983.

Situs Internet

- www.delfin.ccc.eu.int/www/europa.eu.int